



Nomor : 344/WK/CORSEC/2023

Jakarta, 19 Juni 2023

Kepada Yth. :

Dewan Komisiner

Otoritas Jasa Keuangan

Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal,
Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4
Jakarta

Perihal : **Penyampaian Bukti Iklan Pengumuman Hasil
RUPO atas Obligasi Berkelanjutan III Waskita
Karya Tahap III Tahun 2018**

Dengan Hormat,

Bersama ini PT Waskita Karya (Persero) Tbk ("Perseroan") menyampaikan Bukti Iklan Pengumuman Hasil Rapat Umum Pemegang Obligasi ("RUPO") atas Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap III Tahun 2018 yang telah dilaksanakan pada Rabu, 14 Juni 2023. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Perseroan menyampaikan Pengumuman Hasil RUPO atas Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap III Tahun 2018 yang telah dilakukan pada Jumat, 16 Juni 2023 pada Surat Kabar Harian Terbit sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Lamp : 1 Berkas

Tembusan:

- Direksi PT Bursa Efek Indonesia
- PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
- Wali Amanat PT Bank Mega Tbk
- Board of Directors

KPU PASTIKAN DESAIN TEKNIS PEMILU SESUAI SISTEM PROPORSIONAL TERBUKA

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memastikan akan merancang regulasi teknis Pemilu 2024 sesuai dengan sistem pemilu proporsional terbuka, sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi terkait uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.



IDHAM HOLIK

”

Jadi ke depan, kami akan mendesain regulasi teknis penyelenggaraan pemilu yaitu sesuai dengan sistem proporsional daftar terbuka

Idham Holik

Jakarta, HanTer—Regulasi teknis itu mengacu pada Undang-Undang Pemilu yang memang mengamatkan penyelenggaraan pemilu di Tanah Air menggunakan sistem proporsional terbuka.

“Jadi ke depan, kami akan mendesain regulasi teknis penyelenggaraan pemilu yaitu sesuai dengan sistem proporsional daftar terbuka,” ujar anggota KPU RI Idham Holik dalam konferensi pers di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis (15/6/2023)

Dijelaskan regulasi teknis tersebut mengatur sejumlah hal, di antaranya adalah pemungutan dan penghitungan suara, metode konversi suara menjadi kursi di parlemen, serta penentuan calon anggota legislatif (caleg) terpilih.

Dalam kesempatan yang sama, Idham menyampaikan pula dalam waktu dekat, KPU akan mengundangi media massa, perwakilan

masyarakat sipil, dan partai politik peserta Pemilu 2024 mengikuti uji publik rancangan PKPU tentang pemungutan dan penghitungan suara.

Sebelumnya, majelis hakim Mahkamah Konstitusi telah menyatakan menolak permohonan para pemohon terkait dengan uji materi terhadap Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengenai sistem proporsional terbuka yang didaftarkan dengan nomor registrasi perkara 114/PUU-XX/2022 pada 14 November 2022.

Dengan demikian, sistem pemilu proporsional terbuka tetap berlaku pada Pemilu 2024.

“Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya,” ucap Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Anwar Usman ketika membacakan putusan di Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.

■ Safari



Prabowo Tak Ragu Hapus Budaya Korupsi di Industri Pertahanan

Bandung, HanTer - Menteri Pertahanan (Menhan) RI Prabowo Subianto mengatakan dirinya tidak ragu untuk menghapus budaya korupsi di sektor industri pertahanan berupa budaya mark up (pengelembungan), bohong, dan menipu.

“Presiden kita, Pak Jokowi, tak ragu bertindak, dan saya pun tidak ragu bertindak. Budaya mark up yang kelewatan luar biasa, budaya bohong dan menipu, harus kita hilangkan dari industri pertahanan kita,” ujar Prabowo dalam acara The 1st DEFEND ID’s Day di Hanggar PT Dirgantara Indonesia, Bandung, Kamis (15/6/2023)

Prabowo mengatakan, Indonesia perlu bersyukur karena inflasi di Tanah Air terbilang salah satu paling rendah di antara negara lain di tengah krisis dunia saat ini.

“Kita bersyukur di saat krisis dunia, krisis akibat COVID-19, perang ukraina yang dahsyat, harga barang penting naik, harga energi naik, harga pupuk naik, harga pangan naik, kita bersyukur di Indonesia inflasi kita salah satu paling rendah di dunia,” ujarnya.

Menurutnya, pencapaian tersebut bukanlah prestasi yang sepele karena inflasi adalah momok bagi seluruh negara di dunia. Dia menyebut strategi yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia sudah berada di jalur yang benar.

“Argentina inflasinya lebih dari 100 persen, Turki

85 persen, negara-negara tetangga kita banyak ekonomi ambruk. Beberapa negara di kawasan kita sudah tidak bisa bayar gaji, uangnya habis, produksinya enggak ada,” kata Prabowo.

Namun begitu, Prabowo menilai masih banyak kekurangan yang perlu diatasi di Indonesia, mulai dari budaya pemborosan hingga korupsi.

“Kita mengerti bersama masih banyak terjadi di negara kita budaya-budaya yang tidak baik, budaya pemborosan, kebocoran, korupsi, budaya macam-macam, setiap pemimpin Indonesia akan menghadapi tantangan ini dan harus kita atasi dengan sebaik-baiknya,” kata Menhan.

Pada kesempatan yang sama, Prabowo menyebut industri pertahanan adalah hal yang vital bagi kemerdekaan dan kedaulatan bangsa karena Indonesia merupakan negara yang besar dan kaya akan sumber daya.

“Industri pertahanan adalah bagian vital, bagian yang menentukan dari kemerdekaan kita, kedaulatan kita,” ujarnya.

Prabowo menyebut dengan kekayaan yang dimiliki itu, Indonesia tidak boleh lengah akan potensi bahaya yang ditimbulkan. Dia menambahkan, kekuatan pertahanan Indonesia adalah mutlak karena dirinya menilai persaingan antarbangsa dewasa ini semakin keras.

■ Safari

BNPT Ajak Generasi Muda Sebarkan Pesan Damai

Semarang, HanTer—Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengajak generasi muda menjadi agen perdamaian yang menyebarkan pesan-pesan damai untuk menangkang propaganda radikalisme yang kian masif di dunia maya.

Deputi Bidang Pence-

gahan, Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT Mayjen TNI Nisan Setiadi, dalam pernyataan yang diterima di Semarang, Kamis (15/6/2023) menyebut propaganda radikalisme sekarang ini memanfaatkan internet.

“Salah satu keresahan dari derasnya arus infor-

masi dan teknologi melalui dunia maya adalah pemanfaatan internet oleh kelompok radikal terorisme dalam melakukan propaganda,” ujar Nisan pada kegiatan Penguatan Duta Damai Santri Jawa Tengah dan Regenerasi Duta Damai Regional Jawa Tengah.

Karena itu, kata dia, strategi menangkang propaganda radikalisme di dunia maya harus sejalan dengan kemampuan kelompok teroris dalam memanfaatkan jaringan internet sebagai alat mempromosikan paham kekerasan.

Dalam melawan propaganda radikalisme dan terorisme, kata dia, membutuhkan kalangan generasi yang cerdas teknologi, visioner, kreatif, inovatif dan cerdas dalam membuat konten di dunia maya.

“Dengan adanya kegiatan pembentukan Duta Damai Dunia Maya dan Duta Damai Santri di Provinsi Jateng, saya berharap generasi muda, khususnya di Jateng bisa menjadi agen perdamaian yang bisa menyebarkan pesan perdamaian di dunia maya,” harapnya.

Duta Damai Provinsi Jawa Tengah yang dikukuhkan itu, kata dia, merupakan mitra BNPT dan Pemerintah Daerah dalam kampanye perdamaian di daerah melalui kegiatan offline dan online.

Sementara itu, Kepala Biro Pemerintahan Otonomi Daerah dan Kerjasama Setda Kota Semarang Muhammad Masrofi mengapresiasi upaya pencegahan terorisme yang dilakukan BNPT, termasuk pembentukan Duta Damai.

Meski sekarang situasi dan kondisi di Indonesia kondusif, kata dia, potensi terorisme tetap ada sehingga penting bagi semua pihak melakukan berbagai upaya pencegahan agar tidak ada ancaman terorisme.

■ Zamzam

PENGUMUMAN

HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI

OBLIGASI BERKELANJUTAN III WASKITA KARYA TAHAP III TAHUN 2018

PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwalianamanat Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap III Tahun 2018, Akta No. 44, tanggal 13 September 2018, yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap III Tahun 2018 (“RUPO”) pada tanggal 14 Juni 2023, bertempat di Gedung Waskita Heritage Lt. 11, Jalan MT Haryono Kav No. 10 Cawang, Jakarta 13340, yang telah dihadiri oleh Pemegang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap III Tahun 2018 (“Pemegang Obligasi”) dan/atau Kuasa Pemegang Obligasi yang sah yang seluruhnya mewakili Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap III Tahun 2018 (“Obligasi”) yang bernilai pokok sebesar Rp919.000.000.000,00 (sembilan ratus sembilan belas miliar Rupiah) atau sebanyak 919.000.000.000 (sembilan ratus sembilan belas miliar) suara yang merupakan 97,58% (sembilan puluh tujuh koma lima delapan persen) dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi, termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk (“Emiten”) dan/atau Afiliasi Emiten, yang telah diterbitkan oleh Emiten, yaitu berjumlah Rp941.750.000.000,00 (sembilan ratus empat puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah). Dalam RUPO tersebut, Pemegang Obligasi dan/atau Kuasa Pemegang Obligasi yang hadir, sebanyak 70.000.000.000 (tujuh puluh miliar) suara atau mewakili Obligasi yang bernilai Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar Rupiah) menyatakan abstain, sebanyak 171.000.000.000 (seratus tujuh puluh satu miliar) suara atau mewakili Obligasi yang bernilai Rp171.000.000.000,00 (seratus tujuh puluh satu miliar Rupiah) menyatakan tidak setuju dan sebanyak 678.000.000.000 (enam ratus tujuh puluh delapan miliar) suara atau mewakili Obligasi yang bernilai Rp678.000.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh delapan miliar Rupiah) atau 79,86% (tujuh puluh sembilan koma delapan enam persen) menyatakan setuju, sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPO, Pemegang Obligasi dalam RUPO menyetujui usulan dari Emiten dalam RUPO tersebut sebagai berikut :

I. Menyetujui perubahan dan/atau penambahan ketentuan dalam Perjanjian Perwalianamanat Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap III Tahun 2018, Akta Nomor 44, tanggal 13 September 2018, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, pada Pasal 5 mengenai Jadwal Pembayaran Bunga Obligasi, antara lain:

Menyetujui perubahan Pasal 5 ayat 4 angka 2) huruf b Perjanjian Perwalianamanat Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap III Tahun 2018, Akta Nomor 44, tanggal 13 September 2018, yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, sehingga untuk selanjutnya Pasal 5 ayat 4 angka 2) huruf b ditulis dan berbunyi menjadi sebagai berikut :

4. Bunga Obligasi:

2) Jadwal dan periode pembayaran:

Bunga Obligasi dibayarkan secara triwulan terhitung sejak Tanggal Emisi sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi.

Jadwal Pembayaran Bunga Obligasi yaitu:

b. Untuk Obligasi Seri B:

1. pembayaran ke-1, yaitu pada tanggal 28 Desember 2018,
2. pembayaran ke-2, yaitu pada tanggal 28 Maret 2019,
3. pembayaran ke-3, yaitu pada tanggal 28 Juni 2019,
4. pembayaran ke-4, yaitu pada tanggal 28 September 2019,
5. pembayaran ke-5, yaitu pada tanggal 28 Desember 2019,
6. pembayaran ke-6, yaitu pada tanggal 28 Maret 2020,
7. pembayaran ke-7, yaitu pada tanggal 28 Juni 2020,
8. pembayaran ke-8, yaitu pada tanggal 28 September 2020,
9. pembayaran ke-9, yaitu pada tanggal 28 Desember 2020,
10. pembayaran ke-10, yaitu pada tanggal 28 Maret 2021,
11. pembayaran ke-11, yaitu pada tanggal 28 Juni 2021,
12. pembayaran ke-12, yaitu pada tanggal 28 September 2021,
13. pembayaran ke-13, yaitu pada tanggal 28 Desember 2021,
14. pembayaran ke-14, yaitu pada tanggal 28 Maret 2022,
15. pembayaran ke-15, yaitu pada tanggal 28 Juni 2022,
16. pembayaran ke-16, yaitu pada tanggal 28 September 2022,
17. pembayaran ke-17, yaitu pada tanggal 28 Desember 2022,
18. pembayaran ke-18, yaitu pada tanggal 28 Maret 2023, akan dibayarkan pada tanggal 28 September 2023,
19. pembayaran ke-19, yaitu pada tanggal 28 Juni 2023 akan dibayarkan pada tanggal 28 September 2023,
20. pembayaran ke-20, yaitu pada tanggal 28 September 2023,

dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 15.12. Perjanjian Perwalianamanat.

II. 1. Sehubungan dengan keputusan RUPO Nomor I tersebut di atas, Pemegang Obligasi menyetujui untuk memberikan kuasa dan kewenangan kepada PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat untuk membuat dan menandatangani perubahan/addendum Perjanjian Perwalianamanat Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap III Tahun 2018, Akta Nomor 44, tanggal 13 September 2018, yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, dan melakukan segala tindakan yang berkaitan dengannya termasuk tetapi tidak terbatas untuk menghadap Notaris dan menandatangani perubahan/addendum perjanjian-perjanjian tersebut, untuk melaksanakan keputusan RUPO tanggal 14 Juni 2023.

2. Para Pemegang Obligasi dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk selaku Emiten dengan ini menyetujui dan menerima tanpa syarat setiap tindakan Wali Amanat sebagai tindakan para Pemegang Obligasi maupun PT Waskita Karya (Persero) Tbk selaku Emiten itu sendiri, oleh karenanya Pemegang Obligasi dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk selaku Emiten dengan ini menyatakan secara tegas membebaskan PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat, Notaris, dan saksi-saksi, dari setiap klaim, tuntutan, dan/atau gugatan perdata maupun pidana dari pihak manapun termasuk namun tidak terbatas sehubungan dengan pelaksanaan keputusan RUPO tanggal 14 Juni 2023.

III. Sesuai ketentuan dalam Pasal 10 Perjanjian Perwalianamanat, seluruh biaya-biaya penyelenggaraan RUPO antara lain biaya pengumuman RUPO, pemanggilan RUPO, Notaris dan biaya-biaya lainnya sehubungan dengan penyelenggaraan dan pelaksanaan RUPO tanggal 14 Juni 2023 menjadi beban PT Waskita Karya (Persero) Tbk selaku Emiten.

Jakarta, 16 Juni 2023

EMITEN
WASKITA

PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk

WALI AMANAT
BANK MEGA

PT BANK MEGA Tbk

Jakarta, 16 Juni 2023

EMITEN
WASKITA

PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk

WALI AMANAT
BANK MEGA

PT BANK MEGA Tbk